Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis
Vol 20, No 1, 2025, Hal. 16 - 28

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL

Wendri Sukmarani [1)], Maria Magdalena Pur Dwiastuti [2)], Luluk Kholisoh [3)]
[1,2,3]Universitas Nusa Megarkencana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
[1]email: wendrisukmarani79@gmail.com
[2]email: mariastienus@gmail.com
[3]email: lk210967@gmail.com

Abstrak

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, peningkaan infrastruktur di desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pengelolaan dan penggunaan dana desa harus dilakukan berdasarkan azas akuntabilitas, transparan, dan melibatkan masyarakat mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan laporan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat umum. Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, serta ada keterlibatan masyarakat menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa, sehingga diharapkan tujuan dari Dana Desa akan dapat dicapai yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa juga dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan dari para responden masyarakat di wilayah desa di Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilas dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi transparasi penggunaan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Keywords: *Dana Desa, Pengelolaan, Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

The Village Fund is allocated by the central government to every village in Indonesia with the aim of equitable development, improving village infrastructure and improving the welfare of village communities. Village funds are public funds that are used for the benefit of the general public. The management and use of village funds must be carried out based on the principles of accountability, transparency, and involve the community from budget preparation to reports that must be accountable to the public or the general public. The management of the Village Fund that is accountable, transparent, and has community involvement is an obligation for the village government, so that it is hoped that the objectives of the Village Fund will be achieved, namely to realize the welfare of the village community. Community involvement in the management of the Village Fund can also support the success of development. This study aims to examine the effect of Village Fund management on the welfare of village communities in Bantul Regency. The study used primary data collected from community respondents in village areas in Bantul Regency. The results of this study are accountability and community participation in using village funds affect the welfare of village communities. However, transparency in the use of village funds has no effect on the welfare of village communities.
Keywords: *Village Fund, Management, Community Welfare*

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

A. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah mengharuskan setiap wilayah memiliki kemandirian dalam mengelola pendapatan dan membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi hal yang sangat penting. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah mencerminkan kemampuan fiskal suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Ketika daerah memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai, hal ini dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan (Syahril, 2020).

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memperoleh alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal itu disebutkan dalan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa (2014). Dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga desa.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bantul, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima alokasi Dana Desa yang cukup besar setiap tahunnya (Pemerintah kabupaten bantul, 2024). Optimalisasi pengelolaan Dana Desa di daerah ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan publik. Namun, efektivitas pengelolaan Dana Desa masih menjadi perdebatan, mengingat adanya perbedaan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat antar desa yang menerima dana tersebut.

Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa penggunaan dana publik benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan. Salah satunya adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, yang menekankan pengelolaan Dana Desa secara tertib, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan (Peraturan Bupati Bantul, 2023). Selain itu, pada tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul melaporkan bahwa Dana Desa sebesar Rp126,479 miliar telah terserap 100% oleh 75 desa di wilayah tersebut (Peraturan Bupati Bantul, 2023). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Setyawan, 2024).

Beberapa desa di Kabupaten Bantul menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berkat pengelolaan Dana Desa yang transparan dan tepat sasaran. Di sisi lain, terdapat desa yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal.

B. KAJIAN LITERATUR DAN TEORI

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

Tujuan pemberian Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa (Peraturan Pemerintah RI, 2014) adalah :

a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
b. Mengentaskan kemiskinan
c. Memajukan perekonomian desa
d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip :

a. Transparansi adalah asas keterbukaan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses seluas-luasnya terhadap informasi mengenai keuangan desa. Prinsip ini menegaskan pentingnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak terkait pelaksanaan pemerintahan desa, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Prinsip ini mewajibkan agar setiap kegiatan serta hasil penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
c. Partisipatif berarti pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan dengan melibatkan lembaga desa dan elemen masyarakat, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif.
d. Tertib dan disiplin anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan aturan, pedoman, dan ketentuan hukum yang berlaku agar terwujud tata kelola yang tertib, efisien, dan akuntabel.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang menekankan kewajiban suatu pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas sering dikaitkan dengan sektor publik, organisasi non-profit, serta entitas bisnis dalam rangka meningkatkan transparansi dan kinerja (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Nurfaisal, 2019).

Akuntabilitas memiliki peran krusial dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Penekanan pentingnya akuntabilitas birokrasi dalam sistem keuangan daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Implementasi teknologi digital seperti *e-budgeting* dan *e-audit* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tantangan seperti kurangnya literasi digital dan ruang komunikasi publik perlu diatasi melalui kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat secara inklusif (Lathifah et al., 2024).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas organisasi, antara lain (Setiawan, 2020):

a. Transparansi: Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik.
b. Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.
c. Sistem Pengawasan: Adanya mekanisme kontrol yang efektif, seperti audit internal dan eksternal.

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

d. Kompetensi Sumber Daya Manusia: Kemampuan individu dalam mengelola tanggung jawab dan tugasnya dengan profesional.

4. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan tuntutan yang semakin penting bagi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa salah satu langkah nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu serta berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku secara umum (Undang - Undang Republik Indonesia, 2003). Peraturan pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban peraturan perundang undangan (Peraturan Pemerintah, 2010).

Transparansi dibutuhkan untuk proses pengawasan dan mencegah terjadinya tindak penyelahgunaan dan penyelewengan sumber daya publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuka secara luas untuk publik. Taufik mengemukakan bahwa transparansi memegang peranan penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan mandat dari masyarakat, karena hal ini menuntut pemerintah untuk menyajikan informasi secara menyeluruh terkait program serta kegiatan yang dilaksanakan (Adiputra, 2018).

Transparansi dapat diartikan sebagai tersedianya informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak, khususnya masyarakat umum, serta kejelasan mengenai regulasi yang berlaku. Transparansi ini tercermin melalui beberapa indikator, yaitu: (1) tersedianya informasi yang akurat dan disampaikan tepat waktu, (2) informasi yang menjelaskan prosedur dan biaya secara rinci, (3) kemudahan dalam mengakses informasi, serta (4) adanya mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran. Menurut Setiawan (2020) beberapa indikator utama transparansi adalah :

a. Keterbukaan Informasi
b. Aksesibilitas Informasi
c. Partisipasi Publik
d. Akuntabilitas dalam Pelaporan
e. Pengawasan dan Regulasi yang Mendukung

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program atau kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Arnstein, 1969). Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi dapat berupa keterlibatan dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, pengawasan, serta pemanfaatan hasil pembangunan (Cohen & Uphoff, 1980). Efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan program yang didanai (Mawardi, 2019) Transparansi informasi dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan sangat menentukan keberhasilan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan yang berkelanjutan (Saragih, 2021). Desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel (Rahman & Setiawan, 2022). Dampak positif dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa antara lain:

a. Meningkatkan efektivitas program pembangunan desa
b. Meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

c. Mendorong kemandirian desa dalam pembangunan

6. Kesejahteraan Masyarakat

Elvina (2019) menyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tidak lepas dari adanya peran pemerintah melalui implementasi Dana Desa. Kesejahteraan masyarakat merujuk pada situasi di mana individu dalam suatu wilayah memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari komunitas sosial.

Kesejahteraan masyarakat daerah akan semakin baik apabila didukung oleh kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, karena masyarakat tersedia lapangan kerja sehingga masyarakat dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa, pemerintah mengucurkan Dana Desa kepada seluruh desa di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi lokal berjalan seiring dengan kemajuan pembangunan desa. Indikator kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

a. Adanya peluang kerja yang lebih luas bagi warga desa
b. Penurunan angka pengangguran di wilayah pedesaan
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih layak, seperti PAUD, jalan, jembatan, dan penerangan
d. Bertambahnya pendapatan desa melalui pengelolaan BUMDes
e. Meningkatnya penghasilan masyarakat desa secara keseluruhan
f. Aktivitas ekonomi desa yang lebih dinamis, sehingga dapat menekan laju urbanisasi

7. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat kerangka teoritis dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai acuan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Wisaksani (2023), Transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. akan tetapi menurut menelitian Citra Damayanti (2023) ke 3 variabel Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan Emha Amir Fikri Anas & Setiyowati Wahyu (2021) Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut.

8. Hipotesis Penelitian.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Y).
H2 : Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Y).
H3 : Partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Y).

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

H4 : Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Y).

9. Kerangak Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara variabel pengelolaan dana desa dengan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut model penelitian ini :

Gambar 1. Model Penelitian

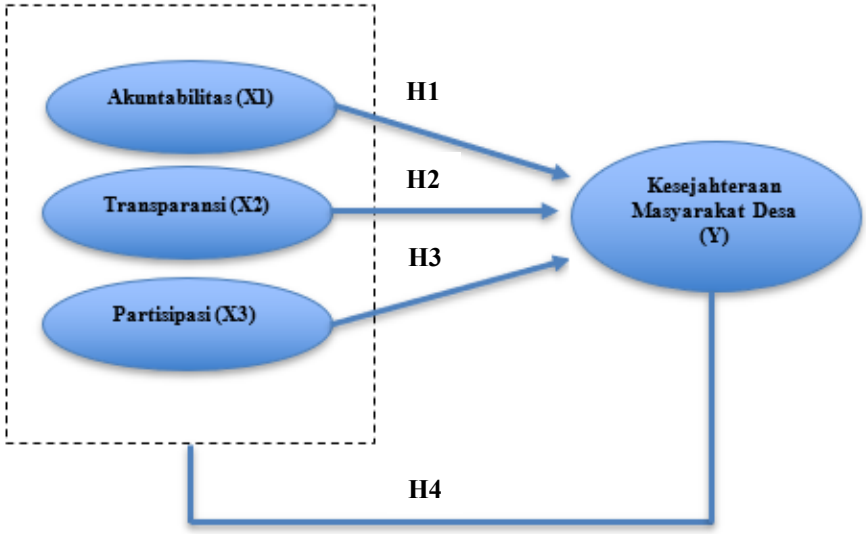

Akuntabilitas (X1), Pengelolaan dana desa yang akuntabel menciptakan pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan anggaran. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong optimalisasi pembangunan desa.

Transparansi (X2), Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Transparansi meminimalisir korupsi dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Partisipasi (X3), Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Kesejahteraan Masyarakat (Y), Merupakan dampak akhir dari pengelolaan dana desa yang baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.

C. METODE PENELITIAN

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah masyarakat desa di Kabupaten Bantul yang menikmati hasil pembangunan dengan menggunakan sumber keuangan dari Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan strategi asosiatif yang menggunakan pendekatan hubungan pada dua atau lebih variabel. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang Pengelolaan Dana Desa yang meliputi Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y).

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

2. Jenis Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang tengah berlangsung serta menafsirkannya berdasarkan perspektif dari objek yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan telaah literatur (studi pustaka). Kuesioner dimodifikasi dari Buku Saku Dana Desa Kementrian Keuangan Tahun 2017 menggunakan skala Likert. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 desa. Kuesioner diberikan kepada responden pada masing-masing desa.

3. Analisis Data

Kualitas data kuesioner pada setiap instrumen yang disebarkan dinilai berdasarkan tingkat keandalan dan validitasnya. Untuk memastikan akurasi, dilakukan pengujian dan pengukuran melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang terkumpul dari responden dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji prasyarat, dan pengujian hipotesis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menilai kualitas kuesioner yang disampaikan kepada responden. Sebuah kuesioner dianggap valid dan reliabel apabila butir pernyataannya mampu merepresentasikan secara akurat apa yang ingin diukur oleh instrumen tersebut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Signifikan	α	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,681	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,728	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,651	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,642	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,708	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X1.6	0,811	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X1.7	0,599	0,1757	0,000	0,05	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,786	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,656	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,826	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,764	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,766	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X2.6	0,56	0,1757	0,000	0,05	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,793	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X3.2	0,733	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X3.3	0,75	0,1757	0,000	0,05	Valid
	X3.4	0,696	0,1757	0,000	0,05	Valid
Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y)	Y.1	0,748	0,1757	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,759	0,1757	0,000	0,05	Valid
	Y.3	0,653	0,1757	0,000	0,05	Valid
	Y.4	0,614	0,1757	0,000	0,05	Valid
	Y.5	0,798	0,1757	0,000	0,05	Valid
	Y.6	0,693	0,1757	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

Hasil dari uji validitas pada table 1 menunjukan bahwa semua item pertanyaan dari kuisioner yang disebar sebanyak 125 mempunyai nilai r hitung > r table, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan sudah valid.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,81	0,06	Reliabel
Transparansi (X2)	0,823	0,06	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,715	0,06	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,798	0,06	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Hasil dari uji realiabilitas pada table 2 menunjukan bahwa semua item variabel mempunyai nilai cronbach's alpha > 0,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07130695
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.832
Asymp. Sig. (2-tailed)		.493

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Hasil uji normalitas pada table 3 menunjukan signifikasi sebesar 0,493 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.620	1.614
	X2	.562	1.778
	X3	.681	1.469

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

Hasil uji Multikolinearitas pada table 4 menunjukan nilai *tolerance* sebesar lebih dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat di simpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.212	.689		-.307	.759
	X1	.059	.033	.205	1.814	.072
	X2	-.027	.038	-.083	-.703	.484
	X3	.030	.052	.062	.574	.567

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Hasil Uji Heteroskedastisitas pada table 5 menunjukan nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Persamaan Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients
		B
1	(Constant)	2,886
	X1	0,193
	X2	0,222
	X3	0,566

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Y = 2,886 + 0,193 X1 + 0,222 X2 + 0,566 X3

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel 6 menunjukan nilai koefisien konstanta dan beta variabel Y dan X bernilai positif ini dapat diartikan variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y).

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinan (R^2)

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587[a]	.345	.328	2.09683

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 7 menunjukan nilai Adjusted R Square sebesar 0,345 atau 34,5% menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y), sebesar 34,5%. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 34,5% perubahan yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan ketiga variabel tersebut. Sementara itu, sebesar 65,5% variasi dalam kesejahteraan masyarakat desa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, yang dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, atau faktor eksternal lainnya.

b. Hasil Uji F

Tabel 8. Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279.649	3	93.216	21.202	.000[a]
	Residual	531.999	121	4.397		
	Total	811.648	124			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 21,202, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,680. Selain itu, nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000 berada di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen yang terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam penggunaan Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kesejahteraan Masyarakat Desa. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

c. Hasil Uji T

Tabel 9. Uji T

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.886	2.050		1.408	.162
	X1	.193	.097	.186	1.988	.049
	X2	.222	.114	.191	1.951	.053
	X3	.566	.154	.328	3.676	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Hasil Uji T pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial terlihat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan transparasi penggunaan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa, hal ini bisa diartikan meskipun Dana Desa dikelola transparan, hal ini tidak selalu berati Dana Desa digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat desa. Namun, penelitian yang sama menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan, hal tersebut tidak selalu berarti bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Hal ini menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa didukung oleh faktor-faktor lain seperti akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Krisanti & Sapari, 2023).

Transparasi bisa saja hanya sebatas laporan administrasi tanpa memastikan bahwa Dana Desa benar – benar digunakan untuk program yang bedampak langsung pada masyarakat desa. Akuntabilitas mempengaruhi terhadap kebijakan dan penggunaan Dana Desa benar – benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat sehingga hal ini dapat mencegah dalam penyalahgunaan Dana Desa, terlebih lagi dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa dapat dipastikan program penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa dapat mendorong terciptanya efektivitas kebijakan desa sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan bukan hanya keputusan sepiha dari pemerintah desa sehingga hal ini dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengumpulan jawaban responden dari desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, akan tetapi transparansi pengunaan Dana Desa tidak terpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten Bantul. Transparasi hanya sebatas laporan administrasi tanpa memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan program yang dibutuhkan masyarakat desa, sedangkan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa mempengaruhi kebijakan dan penggunaan Dana Desa sesuai

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

kebutuhan program masyakat desa sehingga dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I. M. P. (2018). Transparency of Local Government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting*, *3*(1).

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *34*(5), 216–224.

Citra Damayanti, D. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran*. UIN Raden Intan. https://repository.radenintan.ac.id/22720/

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, *8*(3), 213–235.

Elvina. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *3*(1).

Emha Amir Fikri Anas, D., & Setiyowati Wahyu, S. (2021). Partisipasi Membentuk Hubungan antara Aspek Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradapan*, *7*(2). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/26833

Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.

Krisanti, P., & Sapari. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*(10). http://repository.radenintan.ac.id/22720/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/22720/1/BAB I II V _ Perpustakaan Pusat.pdf

Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *11*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset.

Mawardi, I. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *12*(1), 45–58.

Nurfaisal, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *05*(01).

Pemerintah kabupaten bantul. (2024). *Data Umum Kabupaten Bantul*. Kabupaten Bantul. https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000028/data-umum.html#:~:text=Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah,%2C yaitu 18%2C32 Km2.

Peraturan Bupati Bantul. (2023). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Mentri Dalam Negeri Tentang Nomor 20 Pengelolaan Keuangan Desa*. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf

Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tentang Dana*

P-ISSN : 1907-2376
E-ISSN : 2797-8699

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Nomor 60 Tahun 2024).

Puspita Wisaksani, Z. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/40838/

Rahman, A., & Setiawan, T. (2022). Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, *18*(2), 75–90.

Saragih, B. (2021). Dampak Sosialisasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, *17*(2), 112–126.

Setiawan, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Pustaka Utama.

Setyawan, E. (2024). *BPKPAD Bantul Sebut Dana Desa Sudah Terserap 100 Persen*. Times Indonesia. https://jogja.times.co.id/news/berita/2bkqcznjax/BPKPAD-Bantul-Sebut-Dana-Desa-Sudah-Terserap-100-Persen

Syahril, M. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *5*(2), 123–135.

Undang - Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara*.